

PENERAPAN SAK ETAP DALAM LAPORAN KEUANGAN PADA KOPERASI KARYAWAN PT. TATA BUSANA JAKARTA

Dwiyatmoko Pujiwidodo

Program Studi Manajemen Perpajakan
Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta
dwiyatmoko.dpw@bsi.ac.id

ABSTRACT

Preparation of financial statements must be based on generally accepted accounting standards. Standards used in the preparation of financial statements is a standard accounting cooperative entities without public Accountability (SAK ETAP). SAK ETAP is the new standard issued bond replaces SFAS No. accountant Indonesia 27. This scientific article is to discuss the implementation of the SAK ETAP Employees Cooperative PT. Tata Busana aimed to find ways of applying SAK ETAP conducted by the Employees Cooperative PT. Tata Busana and conduct a review aspects assessed to see the accuracy of SAK ETAP Employees Cooperative PT. Tata Busana. Based on the results of the research, it was concluded that Based on the results of the research, that the Employees Cooperative PT. Tata Busana has not made full SAK ETAP as standard in the preparation of financial statements. Therefore Cooperative Employees PT. Tata Busana should perform financial statement presentation SAK ETAP with good and complete, in order to provide full information on the financial condition of the Employees Cooperative PT. Tata Busana.

Keywords : Cooperative, SAK ETAP

I. PENDAHULUAN

Koperasi merupakan salah satu bentuk dari organisasi yang mudah ditemui di Indonesia. Asas koperasi yang menjunjung tinggi kekeluargaan dalam kegiatannya akrab dengan budaya yang telah mendarah daging dalam masyarakat. Selain itu koperasi juga memiliki peran penting bagi perekonomian masyarakat Indonesia terutama masyarakat dengan ekonomi lemah. Sebagai contoh, koperasi simpan pinjam dapat memberikan solusi pendanaan bagi masyarakat. Hal ini menjadi salah satu alasan mampunya koperasi tetap mempertahankan eksistensinya di tengah perkembangan ekonomi yang menyediakan berbagai alternatif ragam organisasi lain.

Koperasi saat ini dituntut untuk lebih transparan dalam melaporkan setiap hasil dari aktivitas yang telah dicapai. Sama halnya dengan organisasi lain, salah satu bentuk transparansi yang harus dilakukan koperasi adalah dengan cara menyusun dan menerbitkan laporan keuangan organisasi dengan mengikuti standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) sebagai solusi bagi perusahaan menengah dan kecil yang sering menemukan kesulitan dalam menerapkan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang selama ini berlaku.

IAI telah menerbitkan SAK ETAP pada tanggal 17 Juli 2009. SAK ETAP ini sendiri berlaku secara efektif untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai setelah 1 Januari 2011. Apabila SAK ETAP ini telah berlaku efektif, maka perusahaan kecil seperti UKM dan Koperasi tidak perlu membuat laporan keuangan dengan menggunakan PSAK umum yang berlaku. Di dalam beberapa hal SAK ETAP memberikan banyak kemudahan untuk perusahaan dibandingkan dengan PSAK dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks. Sesuai dengan ruang lingkup SAK ETAP maka Standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal.

II. PENDAHULUAN

2.1. Koperasi

A. Pengertian Koperasi

Koperasi dikenal sebagai badan usaha yang dibangun dari dan untuk anggota. Hal ini dikarenakan modal pendirian koperasi berasal dari anggotanya dan beroperasi berdasarkan keputusan dari semua anggota yang terdaftar. Berdasarkan UU No 17 Tahun 2012 Pasal 1 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Hal ini mengandung makna bahwa koperasi sebagai badan usaha memiliki perbedaan dengan badan usaha lainnya yang dapat dilihat dari hakikat organisasi dan makna tujuan usaha yang terkandung. Koperasi menekankan bahwa terdapat kesamaan kepentingan dan hak para anggotanya sehingga keputusan tertinggi pada koperasi ditentukan oleh semua anggota koperasi.

B. Tujuan Koperasi

UU No 17 Tahun 2012 Pasal 4 menyatakan bahwa koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Berdasarkan penjelasan tersebut, mengandung makna bahwa tujuan koperasi tidak berfokus pada pencarian laba karena tolak ukur utama yang menjadi pertimbangan adalah kesejahteraan para anggotanya.

C. Jenis – Jenis Koperasi

Berdasarkan UU No 17 Tahun 2012 Pasal 83 dan 84, disebutkan bahwa jenis koperasi terbagi empat, yaitu :

1. Koperasi Konsumen
Yaitu koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan non-Anggota
2. Koperasi Produsen
Yaitu menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan non-Anggota
3. Koperasi Jasa
Yaitu menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh Anggota dan non-Anggota
4. Koperasi Simpan Pinjam

Yaitu menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani Anggota

2.2. Laporan Keuangan

A. Pengertian Laporan Keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia (2015:2) mendefinisikan laporan keuangan adalah laporan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan.

B. Tujuan Laporan Keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia (2015:3) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi

C. Jenis Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini : (IAI,2015:6)

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode
Yaitu Laporan yang minimal mencakup penyajian jumlah pos-pos berikut : aset tetap, properti investasi, aset tidak berwujud, aset keuangan, investasi dengan menggunakan metode ekuitas, aset biologik, persediaan, piutang dagang dan piutang lainnya, kas dan setara kas, total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual dan aset yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai yang dimiliki untuk dijual (sesuai dengan PSAK 58), utang dagang dan terutang lainnya, kewajiban diestimasi, laibilitas keuangan, laibilitas dan aset untuk pajak kini (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 46), laibilitas dan aset pajak tangguhan (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 46), laibilitas yang termasuk dalam kelompok yang dilepaskan yang diklasifikasikan sebagai yang dimiliki untuk dijual (sesuai dengan PSAK 58), kepentingan non-pengendali, disajikan sebagai bagian dari ekuitas, modal saham dan cadangan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (IAI,2015:19)
2. Laporan laba rugi komprehensif selama periode
Yaitu Laporan yang sekurang-kurangnya mencakup penyajian jumlah pos-pos berikut selama suatu periode : pendapatan, biaya

keuangan, bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan joint ventures yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, beban pajak, suatu jumlah tunggal yang mencakup total dari laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan dan keuntungan atau kerugian setelah pajak yang diakui dengan pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau dari pelepasan aset atau kelompok yang dilepaskan dalam rangka operasi yang dihentikan, laba rugi, setiap komponen dari pendapatan komprehensif lain yang diklasifikasikan sesuai dengan sifat, bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan joint ventures yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, total laba rugi komprehensif (IAI,2015;28)

3. Laporan perubahan ekuitas selama periode Yaitu Laporan yang menunjukkan total laba rugi komprehensif selama suatu periode dan tiap komponen ekuitas (IAI,2015;36)
4. Laporan arus kas selama periode Yaitu Laporan yang memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut. (IAI,2015;37)
5. Catatan atas laporan keuangan Yaitu Catatan yang menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu, mengungkapkan informasi yang disyaratkan SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan dan memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan (IAI,2015;37)
6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya

D. Laporan Keuangan Koperasi

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2012 pasal 37 ayat 1c menyatakan bahwa laporan keuangan koperasi sekurang-kurangnya terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut.

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2012 pasal 37 ayat 2, dinyatakan bahwa Laporan keuangan

koperasi dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku (SAK ETAP)

2.3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 27

Pedoman dalam standar akuntansi koperasi di Indonesia menggunakan PSAK 27.

PSAK 27 mengatur sistem akuntansi atas transaksi yang meliputi transaksi setoran anggota koperasi, transaksi usaha koperasi dengan anggotanya, transaksi yang spesifik pada koperasi dan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan

Seiring dengan konvergensi PSAK ke *International Financial Reporting Standard* atau *IFRS*, maka pada tanggal 23 Oktober 2010, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) mengeluarkan *Exposure Draft* Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan (PPSAK) No. 8 terkait PSAK 27, yang membahas akuntansi koperasi. Pernyataan ini berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012.

Sehubungan dengan tidak diberlakukannya lagi PSAK 27, maka pedoman dalam mengatur standar akuntansi di Indonesia menggunakan SAK ETAP

2.4. Standar Akuntansi Keuangan – Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)

Latar belakang dikeluarkannya SAK ETAP adalah karena adanya kebutuhan standar akuntansi keuangan khusus untuk Usaha Kecil (UKM) dan Menengah termasuk koperasi. SAK ETAP dikeluarkan untuk memudahkan UKM dan koperasi dalam menyusun laporan keuangan dan menyampaikan informasi keuangan tersebut.

Terkait dengan hal tersebut, pada tahun 2009 DSAK telah mensahkan SAK ETAP dan mulai berlaku efektif per 1 Januari 2011. Tetapi penerapan sebelum tanggal efektif diperbolehkan, yaitu untuk menyusun laporan keuangan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010

SAK-ETAP merupakan suatu standar akuntansi yang disusun untuk mengatur pelaporan keuangan entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal.

A. Kebijakan Akuntansi Menurut SAK ETAP

1. Pengakuan

- Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam neraca atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria sebagai berikut : (IAI,2011;9)
- a. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas
 - b. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal
2. Pengukuran
Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan. Proses ini termasuk pemilihan dasar pengukuran tertentu. Dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar (IAI,2011;11)
 3. Penyajian
Laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas suatu entitas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan dan beban (IAI,2011;14)
- B. Laporan Keuangan Menurut SAK ETAP**
1. Neraca
Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitassuatu entitas pada suatu tanggal tertentu – akhir periode pelaporan (IAI,2011;14)
Neraca minimal mencakup pos-pos berikut : kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, properti investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, utang usaha dan utang lainnya, aset dan kewajiban pajak, kewajiban diestimasi dan ekuitas (IAI,2011;14)
 2. Laporan Laba Rugi
Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menyajikan semua pos penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode, kecuali SAK ETAP mensyaratkan lain (IAI,2011;23)
Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut : pendapatan, beban keuangan, bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas, beban pajak dan laba atau rugi neto (IAI,2011;23)
 3. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, jumlah investasi, deviden dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama periode tersebut (IAI,2011;26)
Laporan perubahan ekuitas menunjukkan : (IAI,2011;26)
 - a. Laba atau rugi untuk satu periode.
 - b. Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas
 - c. Untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui sesuai kebijakan akuntansi, estimasi dan kesalahan
 - d. Untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah perubahan yang berasal dari laba atau rugi, pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas dan jumlah investasi, dividen dan distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, yang menunjukkan secara terpisah modal saham, transaksi saham treasury, dan dividen serta distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, dan perubahan kepemilikan dalam entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian
 4. Laporan Arus Kas
Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. (IAI,2011;28)
 5. Catatan Atas Laporan Keuangan
Catatan atas laporan keuangan berisi tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan (IAI,2011;34)

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian studi kasus pada perusahaan. Metode

pada penelitian ini menggunakan pendekatan *expost facto* karena variabel yang diteliti tidak dikenai suatu tindakan, perlakuan atau manipulasi, melainkan hanya meneliti dan mengungkapkan faktor – faktor yang diteliti berdasarkan keadaan yang sudah ada.

Penelitian dilaksanakan pada PT. Tata Busana yang beralamat di Jl. Taman Malaka Barat V Blok E10/26 Jakarta Timur. PT. Tata Busana adalah sebuah perusahaan yang menjual aneka busana muslim dan perlengkapan ibadah.

Metode pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan cara mengadakan pencatatan, pengumpulan bahan – bahan tertulis yang mempunyai keterkaitan dengan

permasalahan yang tengah penulis amati. Adapun yang menjadi objek Penelitian adalah penerapan SAK ETAP dalam penyajian laporan keuangan pada koperasi karyawan PT. Tata Busana Jakarta.

IV. HASIL & PEMBAHASAN

4.1. Laporan Keuangan Koperasi Karyawan PT. Tata Busana

Laporan Keuangan Koperasi Karyawan di PT. Tata Busana masih berpedoman pada PSAK 27. Adapun laporan keuangan Koperasi Karyawan di PT. Tata Busana adalah sebagai berikut :

Tabel 1 : Neraca Koperasi Karyawan di PT. Tata Busana

Nama Rekening	Saldo (Rp)	Nama Rekening	Saldo (Rp)
Aktiva		Kewajiban dan Ekuitas	
Aktiva Lancar		Kewajiban Lancar	
Kas dan Bank	100.893.512	Tabungan / Simpanan	284.182.145
Pinjaman yang diberikan (piutang)	501.957.462	Beban yang masih harus dibayar	4.491.264
Piutang Lain-Lain	14.374.998	Total Kewajiban Lancar	288.673.409
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(14.374.998)	Kewajiban tidak Lancar	0
Beban dibayar dimuka	8.783.120	Total Kewajiban Tidak Lancar	0
Persediaan	30.000	Total Kewajiban	288.673.409
Total Aktiva Lancar	611.664.094	Ekuitas	
Aktiva Tidak Lancar		Simpanan Pokok	375.000
Peralatan Kantor	33.475.000	Simpanan Wajib	24.300.000
Akm Penyusutan Peralatan Kantor	(17.576.610)	Modal Penyetaraan	0
Total Aktiva Tidak Lancar	15.899.390	Modal Sumbangan	0
		Cadangan	259.879.615
		SHU yang belum dibagi kan	54.355.460
		Total Ekuitas	338.890.075
Total Aktiva	627.563.484	Total Kewajiban dan Ekuitas	627.563.484

Sumber : Hasil Penelitian (2014)

Tabel 2 : Perhitungan Hasil Usaha Koperasi Karyawan di PT. Tata Busana

Nama Rekening	Saldo (Rp)
Pendapatan Usaha	
Pendapatan Jasa Pinjaman	92.611.259
Pendapatan Jasa Kredit Sepeda Motor dan Handphone	14.021.117
Pendapatan Provisi & Adm	6.736.500
Pendapatan Denda Keterlambatan Pemabayaran Angsuran	3.350.260
Total Pendapatan Usaha	116.719.136
Beban Operasional	
Beban Karyawan	67.929.056
Beban Administrasi Umum	7.987.018
Total Beban Operasional	75.916.074
Sisa Hasil Usaha Bersih	40.803.062
Pendapatan dan Beban Lain-Lain	
Pendapatan Lain-Lain	14.610.898
Beban Lain-Lain	(1.078.500)
Total Pendapatan dan Beban Lain-Lain	13.532.398

Sisa Hasil Usaha Bersih Sebelum Pajak	54.335.460
Taksiran PPh	(6.791.933)
Sisa Hasil Usaha Bersih Setelah Pajak	47.543.527

Sumber : Hasil Penelitian (2014)

4.2. Penerapan SAK ETAP Dalam Laporan Keuangan Koperasi Karyawan PT. Tata Busana

A. Komponen Laporan Keuangan

Sesuai dengan SAK ETAP, dijelaskan bahwa laporan keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik meliputi Neraca, Laba Rugi atau Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Sedangkan pada laporan

keuangan Koperasi Karyawan PT. Tata Busana hanya terdapat dua laporan keuangan neraca dan perhitungan hasil usaha. Seharusnya Koperasi Karyawan PT. Tata Busana membuat ke lima komponen laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang ada pada Koperasi Karyawan PT. Tata Busana belum sesuai dengan SAK ETAP.

Perbandingan komponen laporan keuangan Koperasi Karyawan PT. Tata Busana dengan SAK ETAP dapat dilihat dalam tabel dibawah ini

Tabel 3 : Perbandingan Komponen Laporan Keuangan Koperasi Karyawan PT. Tata Busana dengan SAK ETAP

Komponen Laporan Keuangan pada Koperasi Karyawan PT. Tata Busana	Komponen Laporan Keuangan menurut SAK ETAP
1. Neraca	1. Neraca
2. Perhitungan Hasil Usaha	2. Laba Rugi atau Perhitungan Hasil Usaha
	3. Laporan Perubahan Ekuitas
	4. Laporan Arus Kas
	5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Sumber : Hasil Penelitian (2014)

B. Penyajian Laporan Keuangan

1. Penyajian Aktiva

Terdapat perbedaan penyajian aktiva pada koperasi karyawan PT. Tata Busana dengan SAK ETAP. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4 : Perbandingan Penyajian Aktiva pada Koperasi Karyawan PT. Tata Busana dengan SAK ETAP

Penyajian Aktiva pada Koperasi Karyawan PT. Tata Busana	Penyajian Aktiva menurut SAK ETAP
1. Aktiva Lancar	1. Aktiva Lancar
- Kas dan Bank	- Kas dan Bank
- Pinjaman yang diberikan (piutang)	- Surat Berharga
- Pinjaman lain	- Piutang Usaha
- Penyisihan piutang tak tertagih	- Piutang pinjaman anggota
- Beban dibayar dimuka	- Piutang pinjaman non anggota
- Persediaan	- Penyisihan piutang tak tertagih
2. Aktiva Tidak Lancar	- Beban dibayar dimuka
- Peralatan	- Persediaan
- Akumulasi Penyusutan Peralatan	2. Aktiva Tidak Lancar
	- Investasi
	- Aktiva tetap, meliputi : Tanah / hak atas tanah, bangunan, mesin, kendaraan dan inventaris
	- Akumulasi Penyusutan
	- Aktiva Tidak Berwujud, meliputi : Hak Paten, Hak Cipta, Hak Pengusaha Hutan, Kuota Impor / Ekspor dan waralaba
	- Aktiva tidak lancar lainnya

Sumber : Hasil Penelitian (2014)

Berdasarkan tabel 4, terlihat adanya perbedaan penyajian aktiva dalam laporan keuangan Koperasi Karyawan PT. Tata Busana dengan SAK ETAP. Perbedaan tersebut adalah akun Pinjaman yang diberikan (Piutang) pada Koperasi Karyawan PT. Tata Busana masih belum memisahkan antara piutang anggota dengan non anggota. Sedangkan menurut SAK ETAP masing-masing piutang pinjaman harus dibedakan antara piutang pinjaman anggota dengan piutang pinjaman non anggota.

Ayat Jurnal Penyesuaian yang diperlukan supaya penyajian akun Pinjaman yang diberikan (piutang) sesuai dengan SAK ETAP adalah sebagai berikut :

Piutang Anggota Rp. 210.966.026
 Piutang Non Anggota Rp. 290.991.436
 Pinjaman yang diberikan Rp. 501.957.462

2. Penyajian Kewajiban
 Terdapat perbedaan penyajian kewajiban pada koperasi karyawan PT. Tata Busana dengan SAK ETAP. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5 : Perbandingan Penyajian Kewajiban pada Koperasi Karyawan PT. Tata Busana dengan SAK ETAP

Penyajian Kewajiban pada Koperasi Karyawan PT. Tata Busana	Penyajian Kewajiban menurut SAK ETAP
1. Kewajiban Lancar	1. Kewajiban Tidak Lancar
- Tabungan / Simpanan	- Simpanan Anggota
- Beban yang masih harus dibayar	- SHU Anggota
2. Kewajiban Tidak Lancar	- Utang usaha
	- Utang bank / lembaga lainnya
	- Beban yang masih harus dibayar
	- Pendapatan diterima dimuka
	2. Kewajiban Tidak Lancar
	- Utang bank atau lembaga lainnya
	- Kewajiban imbalan pasca kerja
	- Kewajiban jangka panjang lainnya

Sumber : Hasil Penelitian (2014)

Berdasarkan tabel 5, terlihat adanya perbedaan penyajian kewajiban dalam laporan keuangan Koperasi Karyawan PT. Tata Busana dengan SAK ETAP. Perbedaan tersebut adalah akun Tabungan (Simpanan) pada Koperasi Karyawan PT. Tata Busana masih belum memisahkan antara simpanan anggota dengan non anggota. Sedangkan menurut SAK ETAP masing-masing simpanan harus dibedakan antara simpanan anggota dengan simpanan non anggota. Ayat Jurnal Penyesuaian yang diperlukan supaya penyajian akun tabungan (simpanan) sesuai dengan SAK ETAP adalah sebagai berikut :

Simpanan Anggota Rp. 210.966.026
 Simpanan Non Anggota Rp. 290.991.436
 Tabungan / simpanan Rp. 501.957.462

3. Penyajian Ekuitas
 Penyajian ekuitas pada koperasi karyawan PT. Tata Busana sudah sesuai dengan SAK ETAP.
4. Penyajian Pendapatan Usaha
 Terdapat perbedaan penyajian pendapatan pada koperasi karyawan PT. Tata Busana dengan SAK ETAP. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 6 : Perbandingan Penyajian Pendapatan pada Koperasi Karyawan PT. Tata Busana dengan SAK ETAP

Penyajian Pendapatan pada Koperasi Karyawan PT. Tata Busana	Penyajian Pendapatan menurut SAK ETAP
1. Pendapatan Jasa Pinjaman	1. Pelayanan anggota
2. Pendapatan jasa kredit sepeda motor dan handphone	2. Pendapatan non anggota
3. Pendapatan provisi dan administrasi	3. Pendapatan lainnya
4. Pendapatan denda keterlambatan pembayaran angsuran	

Sumber : Hasil Penelitian (2014)

SAK ETAP akuntansi koperasi menjelaskan bahwa pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan non anggota diakui sebagai pendapatan (penjualan) dan dilaporkan terpisah dari partisipasi anggota dalam laporan perhitungan hasil usaha sebesar nilai transaksi. Selisih antara pendapatan dan beban pokok transaksi dengan non anggota diakui sebagai laba atau rugi kotor dengan non anggota.

Berdasarkan tabel 6, terlihat adanya perbedaan penyajian pendapatan dalam laporan keuangan Koperasi Karyawan PT. Tata Busana dengan SAK ETAP. Perbedaan tersebut adalah akun pendapatan usaha pada Koperasi Karyawan PT. Tata Busana masih belum memisahkan antara pendapatan anggota dengan non anggota. Sedangkan

menurut SAK ETAP masing-masing pendapatan harus dibedakan antara pelayanan anggota, pendapatan anggota dan pendapatan lainnya.

Ayat Jurnal Penyesuaian yang diperlukan supaya penyajian akun pendapatan usaha sesuai dengan SAK ETAP adalah sebagai berikut :

Pendapatan Usaha Rp. 116.719.136
 Pelayanan Neto Anggota Rp. 46.754.953
 Laba/rugi Non Anggota Rp. 69.964.183

5. Penyajian Beban Operasional
 Terdapat perbedaan penyajian beban operasional pada koperasi karyawan PT. Tata Busana dengan SAK ETAP. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7 : Perbandingan Penyajian Beban Operasional pada Koperasi Karyawan PT. Tata Busana dengan SAK ETAP

Penyajian Beban Operasional pada Koperasi Karyawan PT. Tata Busana	Penyajian Beban Operasional menurut SAK ETAP
1. Beban Operasional	1. Beban Operasional
- Beban karyawan	- Beban Usaha
- Beban administrasi dan Umum	- Beban Perkoperasian
	- Beban Operasional Lainnya

Sumber : Hasil Penelitian (2014)

SAK ETAP akuntansi koperasi menjelaskan bahwa konsep beban operasional dalam laporan perhitungan hasil usaha merupakan gabungan antara beban usaha dan beban perkoperasian. Beban usaha terdiri dari beban-beban penjualan dan beban administrasi dan umum (termasuk gaji karyawan), sedangkan beban yang dikeluarkan untuk meningkatkan sumber daya para anggota dan pengembangan koperasi disebut dengan beban perkoperasian. Berdasarkan tabel 7, terlihat adanya perbedaan penyajian beban operasional dalam laporan keuangan Koperasi Karyawan PT. Tata Busana dengan SAK ETAP. Perbedaan tersebut adalah adanya akun beban karyawan dan beban administrasi dan

umum. Berdasarkan SAK ETAP kedua beban tersebut dijadikan satu sebagai beban usaha

Ayat Jurnal Penyesuaian yang diperlukan supaya penyajian akun beban operasional sesuai dengan SAK ETAP adalah sebagai berikut :

Beban Usaha Rp. 116.719.136
 Beban karyawan Rp. 46.754.953
 Beban adm & umum Rp. 69.964.183

- C. Laporan Keuangan Koperasi Karyawan PT. Tata Busana sesuai SAK ETAP

Berdasarkan penjelasan diatas, maka laporan keuangan koperasi karyawan PT. Tata Busana sesuai SAK ETAP adalah sebagai berikut :

Tabel 1 : Neraca Koperasi Karyawan di PT. Tata Busana

Nama Rekening	Saldo (Rp)	Nama Rekening	Saldo (Rp)
Aktiva		Kewajiban dan Ekuitas	
Aktiva Lancar		Kewajiban Lancar	
Kas dan Bank	100.893.512	Simpanan Anggota	200.848.409
Piutang anggota	210.966.026	Simpanan Non Anggota	83.333.336
Piutang Non Anggota	290.991.436	Beban Yang Masih Harus Dibayar	4.491.264
Piutang Lain-Lain	14.374.998	Total Kewajiban Lancar	288.673.409
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(14.374.998)	Kewajiban tidak Lancar	0
Beban dibayar dimuka	8.783.120	Total Kewajiban Tidak Lancar	0

Persediaan	30.000	Total Kewajiban	288.673.409
Total Aktiva Lancar	611.664.094	Ekuitas	
Aktiva Tidak Lancar		Simpanan Pokok	375.000
Peralatan Kantor	33.475.000	Simpanan Wajib	24.300.000
Akm Penyusutan Peralatan Kantor	(17.576.610)	Modal Penyetaraan	0
Total Aktiva Tidak Lancar	15.899.390	Modal Sumbangan	0
		Cadangan	259.879.615
		SHU yang belum dibagi kan	54.355.460
		Total Ekuitas	338.890.075
Total Aktiva	627.563.484	Total Kewajiban dan Ekuitas	627.563.484

Sumber : Hasil Penelitian (2014)

Tabel 2 : Perhitungan Hasil Usaha Koperasi Karyawan di PT. Tata Busana

Nama Rekening	Saldo (Rp)
Pelayanan Anggota	
Pelayanan Bruto Anggota	46.754.953
Beban Pokok Pelayanan	0
Total Pelayanan Neto Anggota	46.754.953
Laba Rugi Non Anggota	
Pendapatan Bruto Non Anggota	69.964.183
Beban Pokok Pendapatan Non Anggota	0
Laba Rugi Non Anggota	69.964.183
Sisa Hasil Usaha Kotor	116.719.136
Beban Operasional	
Beban Usaha	75.916.074
Beban Perkoperasian	0
Beban Operasional Lainnya	0
Total Beban Operasional	75.916.074
Sisa Hasil Usaha Bersih	40.803.062
Pendapatan dan Beban Lain-Lain	
Pendapatan Lain-Lain	14.610.898
Beban Lain-Lain	(1.078.500)
Total Pendapatan dan Beban Lain-Lain	13.532.398
Sisa Hasil Usaha Bersih Sebelum Pajak	54.335.460
Taksiran PPh	(6.791.933)
Sisa Hasil Usaha Bersih Setelah Pajak	47.543.527

Sumber : Hasil Penelitian (2014)

V. PENUTUP

1. Penyajian laporan keuangan Koperasi Karyawan PT. Tata Busana masih berpedoman pada PSAK No. 27. Seharusnya penyajian laporan keuangan Koperasi Karyawan PT. Tata Busana mengikuti SAK ETAP, karena PSAK 27 telah dihapus
2. Penyajian laporan keuangan Koperasi Karyawan PT. Tata Busana belum sesuai dengan SAK ETAP. Komponen laporan keuangan Koperasi karyawan PT. Tata Busana hanya terdiri dari Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha. Padahal menurut SAK ETAP, laporan keuangan meliputi Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan
3. Pada penyajian laporan keuangan neraca Koperasi Karyawan PT. Tata Busana masih ada yang belum sesuai dengan SAK ETAP yaitu :
 - a. Penyajian akun pinjaman yang diberikan (piutang) belum memisahkan antara pinjaman untuk anggota dengan non anggota
 - b. Penyajian akun simpanan yang diterima belum memisahkan antara simpanan anggota dengan non anggota
4. Pada penyajian laporan keuangan perhitungan hasil usaha Koperasi Karyawan PT. Tata Busana masih ada yang belum sesuai dengan SAK ETAP yaitu :
 - a. Penyajian akun pendapatan usaha belum memisahkan antara pendapatan anggota

dengan non anggota. Sedangkan menurut SAK ETAP masing-masing pendapatan harus dibedakan antara pelayanan anggota, pendapatan anggota dan pendapatan lainnya

- b. Penyajian akun beban operasional untuk akun beban karyawan dan beban administrasi dan umum, seharusnya dijadikan satu sebagai beban usaha

DAFTAR PUSTAKA

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2010). Jenis Koperasi. 7 Juni 2013. http://www.smecca.com/Files/Dep_SDM/BukuSakuKoperasi/2_JENIS_KOPERASI.pdf

Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba.

Kementerian Koperasi & UKM. 2012. Undang-Undang No. 17. Bandung : Fokus Media

Martani, Dwi. (15 Maret 2011). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). 7 Juni 2013. <http://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2011/03/Standar-Akuntansi-Keuangan-Entitas-Tanpa-Akuntabilitas-Publik-SAK-ETAP.pdf>.